



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA

Andita Sulistyowati^{1*}, Anindita Elladevi²

¹Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Siber Muhammadiyah, ²Akuntansi, STIE YKPN

*Corresponding author: anditasulistyowati@sibermu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of organizational culture, internal control systems, and the competence of village officials on the performance of village fund management in Candirotto District, Temanggung Regency. The background of this research stems from ongoing issues in village fund management, such as vulnerability to misuse, low accountability, and suboptimal program implementation. A quantitative approach was employed, involving 68 village officials selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that all three independent variables—organizational culture, internal control systems, and the competence of village officials—have a positive and significant effect on village fund management performance. An ingrained work culture, robust supervision systems, and competent human resources collectively enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of village fund management. These findings provide important implications for policymakers in formulating strategies to improve sustainable village financial governance.

Keywords: *organizational culture, internal control systems, competence of village officials, village funds, management performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Candirotto, Kabupaten Temanggung. Permasalahan pengelolaan dana desa yang masih rawan terhadap penyalahgunaan, rendahnya akuntabilitas, dan kurang optimalnya pelaksanaan program menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 68 responden dari perangkat desa yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Budaya kerja yang tertanam, sistem pengawasan yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompeten secara kolektif mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *budaya organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, dana desa, kinerja pengelolaan*

Informasi Artikel

Diterima : 22/07/2025

Review Akhir : 02/12/2025

Diterbitkan online : 12/2025

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas layanan publik (Sulistyowati, Andriani, dkk, 2024). Namun, efektivitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, termasuk budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa. Faktor-faktor ini menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana dana desa dapat digunakan secara optimal dan transparan.

Budaya organisasi dalam pemerintahan desa mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang membentuk perilaku aparatur dalam menjalankan tugasnya. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong etos kerja yang baik, integritas, serta komitmen tinggi dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, kompetensi aparatur desa mencakup kemampuan teknis, administratif, dan manajerial dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana desa.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang mengalami penyalahgunaan dana desa, ketidaktepatan sasaran program, serta lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih tepatnya kasus ini terjadi pada tahun 2024 di Desa Muntung, Kecamatan Candiroto, Temanggung dimana Kepala Desa tersebut diduga menyelewengkan dana bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan paving. Menurut hasil audit dari Inspektorat, kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp 295 juta dari total anggaran Rp 500 juta. Dana tersebut dicairkan dalam tiga tahap, yaitu Rp 150 juta, Rp 150 juta, dan Rp 200 juta. Namun, dana tersebut kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Radar Semarang, 2024). Kasus ini secara jelas mencerminkan masih lemahnya budaya organisasi yang seharusnya menanamkan nilai integritas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, penyalahgunaan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal di tingkat desa belum berjalan optimal, karena tidak mampu mendeteksi maupun mencegah praktik penyimpangan sejak awal proses pencairan. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengindikasikan adanya masalah dalam kompetensi aparatur desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Fenomena yang sudah disajikan diatas tidak hanya menegaskan adanya kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan indikasi terjadinya konflik kepentingan dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan antara masyarakat sebagai principal dan aparatur desa sebagai agent rentan menimbulkan konflik akibat adanya asimetri informasi. Aparatur desa memiliki akses dan kontrol yang lebih besar atas informasi keuangan dibandingkan masyarakat, sehingga berpotensi memunculkan perilaku oportunistik, seperti penyalahgunaan anggaran. Karena itu, budaya organisasi yang baik, sistem pengendalian internal yang kuat, serta kompetensi aparatur yang memadai menjadi instrumen penting untuk meminimalkan konflik principal-agent tersebut dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kasus-kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa menjadi bukti bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan dana desa. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan turut menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal, penguatan budaya organisasi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi kebutuhan yang mendesak (Sulistyowati, Riskanita, dkk, 2024).

Budaya organisasi dalam pemerintahan desa mencerminkan nilai-nilai, norma, dan etika kerja yang dianut oleh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Budaya kerja yang baik dapat meningkatkan loyalitas, komitmen, dan integritas perangkat desa dalam mengelola sumber daya desa.

Desa yang memiliki budaya kerja yang disiplin dan profesional cenderung memiliki pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan desa dengan budaya kerja yang lemah. Sebaliknya, jika budaya organisasi di desa tidak terbentuk dengan baik, maka risiko praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan rendahnya kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, aparatur desa lebih terdorong untuk bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja pengelolaan desa secara keseluruhan. Menurut Ariani & Gayatri (2021) semakin baik budaya organisasi yang terbentuk dalam suatu instansi, maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan. Selain itu, memiliki budaya organisasi yang kuat akan memungkinkan pemerintah desa menangani dana secara lebih efektif dan efisien serta memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik (Pratamayasa et al., 2024).

Selain budaya organisasi, sistem pengendalian internal berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan sumber daya desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sistem ini mencakup prosedur, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk menghindari kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan desa. Menurut Laksmi dan Sujana (2019) sistem pengendalian internal memungkinkan proses pengelolaan keuangan desa untuk diarahkan, diawasi, dan dideteksi apabila terjadi penyimpangan, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik (Sulistiyowati et al., 2025). Pengendalian internal yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan desa (Puspita dan Ranadi, 2023). Selain itu, sistem ini juga membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini dan memberikan mekanisme koreksi yang tepat. Jika pengendalian internal desa berjalan efektif, maka risiko penyelewengan dana desa dapat diminimalisir. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan berdampak positif pada peningkatan kinerja pengelolaan desa.

Sementara itu, kompetensi aparatur desa menjadi faktor kunci dalam memastikan pengelolaan desa berjalan secara profesional dan sesuai standar. Kompetensi ini mencakup kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi, serta keterampilan dalam mengelola keuangan dan administrasi desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih mampu menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja pengelolaan desa. Dengan kompetensi yang baik, aparatur desa dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat (Andriani et al., 2025).

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kajian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan dana desa.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemahaman mengenai hubungan antara budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa dapat semakin jelas. Dengan begitu, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Kesimpulan dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik sumber daya) dan *agent* (pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya tersebut). Dalam konteks pengelolaan dana desa, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai *principal*, sedangkan

aparatur desa berperan sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola dana publik sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, dalam hubungan agensi ini, sering kali terjadi konflik kepentingan akibat adanya asimetris informasi dan perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent*. Agen memiliki informasi yang lebih banyak terkait dengan proses pengelolaan dana dan dapat bertindak untuk kepentingan pribadinya jika tidak diawasi secara efektif. Kondisi inilah yang disebut *agency problem*, di mana agen dapat saja menyembunyikan informasi atau mengambil kebijakan yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan *principal* (Ni Made et al., 2024).

Harahap & Wirananda (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban *agent* untuk menyampaikan laporan dan mengungkapkan seluruh aktivitasnya kepada pihak yang memberikan mandat. Dengan kata lain, kepala desa dan aparatur desa sebagai *agent* wajib menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat selaku *principal*. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang kuat agar agen tidak menyimpang dari mandat yang diberikan.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut Eka Putra & Latrini (2018) budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang dianut dan dijalankan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan desa, budaya organisasi tercermin dari etos kerja aparatur desa, seperti sikap integritas, kedisiplinan, transparansi, serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola keuangan desa. Budaya organisasi yang positif mampu membentuk perilaku kolektif yang mendukung pengelolaan dana secara bertanggung jawab dan terbuka, sehingga menjadi landasan penting dalam mewujudkan akuntabilitas (Dinda Natalia & Sujana, 2022).

Dalam Teori Agensi, konflik antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (aparatur desa) timbul karena perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Budaya organisasi yang kuat berperan sebagai mekanisme kontrol informal yang mampu menekan potensi tindakan oportunistik *agent*. Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, disiplin, dan orientasi pelayanan publik berfungsi menginternalisasi norma perilaku yang mengurangi kecenderungan aparatur untuk bertindak menyimpang.

Dengan kata lain, ketika budaya organisasi terbentuk secara positif, *agency cost* seperti biaya pengawasan, potensi *moral hazard*, dan risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Aparatur desa terdorong untuk berperilaku sesuai aturan bukan semata karena pengawasan formal, tetapi karena norma dan etika kerja yang tertanam. Oleh karena itu, budaya organisasi yang baik meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, dalam perspektif teori agensi, budaya organisasi dapat dianggap sebagai instrumen mitigasi terhadap permasalahan agensi. Budaya yang kuat tidak hanya memperkuat loyalitas agen terhadap mandat yang diberikan, tetapi juga mengurangi biaya pengawasan eksternal karena kontrol sudah terbangun dari dalam. Hal ini menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu pilar penting dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan.

H1: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Jayanti & Suardana, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, sistem pengendalian internal menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang tertib, terstruktur, dan bebas dari penyimpangan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kinerja pengelolaan dana desa.

Hubungan dengan teori agensi, masyarakat atau pemerintah pusat (sebagai *principal*) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah desa (sebagai *agent*) untuk mengelola dana publik. Namun, relasi ini rentan terhadap permasalahan agensi seperti *moral hazard* dan informasi yang asimetris, karena agen memiliki informasi dan kontrol yang lebih besar dibandingkan prinsipal. Untuk mengatasi potensi penyimpangan tersebut, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan pengendalian agar agen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Selain itu, pengendalian internal membantu *principal* memperoleh informasi yang lebih akurat, sehingga informasi tidak hanya dimonopoli oleh *agent*. Dengan informasi yang lebih simetris, kemampuan aparatur desa untuk menyalahgunakan anggaran menjadi lebih kecil, sehingga pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini, sistem pengendalian internal bertindak sebagai mekanisme pengawasan formal yang mampu membatasi ruang gerak agen untuk bertindak oportunistik. Ketika aparatur desa mengetahui bahwa ada sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur, maka mereka cenderung bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan kejelasan prosedur yang membantu agen dalam menjalankan tugas secara efisien dan sesuai dengan standar. Oleh karena itu, dalam kerangka teori agensi, sistem pengendalian internal memainkan peran sentral dalam menjembatani ketimpangan informasi dan memastikan bahwa mandat yang diberikan oleh *principal* dapat dijalankan secara optimal oleh agen.

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan teknis dalam penyusunan anggaran, pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, kecakapan dalam pelaporan, serta kapasitas untuk mengambil keputusan yang akuntabel (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Aparatur desa yang kompeten akan mampu menjalankan setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, secara tertib administrasi dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dana desa (Sulistyowati, Andriani, et al., 2024).

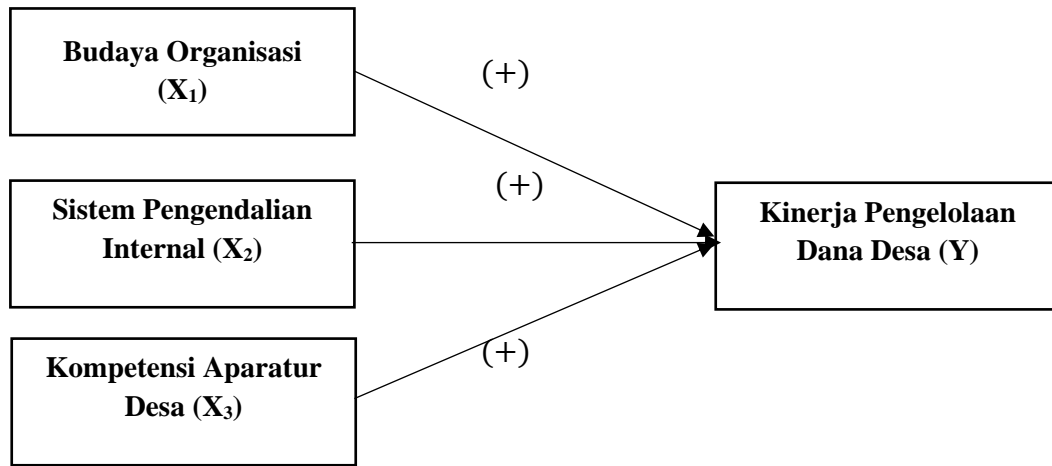
Kinerja pengelolaan dana desa dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti kecepatan dan ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta ketercapaian *output* dan *outcome* program pembangunan desa. Rendahnya kompetensi aparatur kerap menjadi penyebab utama kesalahan dalam perencanaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta kurang optimalnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebaliknya, ketika aparatur memiliki kompetensi yang memadai, mereka lebih mampu menafsirkan peraturan, menyusun dokumen penganggaran dengan benar, serta menyampaikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Kompetensi aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga merupakan faktor penting dalam kerangka Teori Agensi. Aparatur yang memiliki kompetensi rendah berpotensi memperbesar *information asymmetry*, karena ketidakmampuan memahami prosedur, regulasi, atau standar pelaporan membuat *principal* tidak memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana desa.

Sebaliknya, kompetensi yang tinggi, baik dalam aspek pengetahuan keuangan desa, pemahaman regulasi, kemampuan menggunakan sistem informasi, maupun integritas personal, berkontribusi dalam mengurangi asimetri informasi. *Agent* yang kompeten mampu menyajikan laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kompetensi aparatur menjadi faktor penting yang berfungsi menekan risiko perilaku oportunistik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Dasar Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, yaitu Kinerja Pengelolaan Dana Desa (KPDD), serta variabel independen yang terdiri dari Budaya Organisasi (BO), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Kompetensi Aparatur Desa (KAD). Populasi dalam penelitian ini mencakup perangkat desa yang menjabat sebagai Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan TU dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, dan Sekretaris Desa (Carik) yang berada di desa-desa se-Kecamatan Candiroti, Kabupaten Temanggung, dengan sampel sebanyak 84 responden.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai jenis data utama. Data kuantitatif berupa angka atau skor yang diperoleh dari hasil tabulasi jawaban responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa, digunakan metode analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$KPDD = \alpha + \beta_1 BO + \beta_2 SPI + \beta_3 KAD + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- KPDD : Kinerja Pengelolaan Dana Desa
- α : Constanta
- BO : Budaya Organisasi
- SPI : Sistem Pengendalian Internal
- KAD : Kompetensi Aparatur Desa
- β : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- ε : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Responden

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana sampel yang digunakan adalah sampel dengan jawaban yang lengkap dan informasi responden yang relevan. Sejumlah 84 kuesioner yang telah didistribusikan hanya 68 kuesioner yang berhasil dikembalikan dalam kondisi lengkap dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga menghasilkan tingkat respons sebesar 81%. Karakteristik responden yang mengisi kuesioner tersebut, meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama masa jabatan, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Responden

Kriteria		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	57	84%
	Perempuan	11	16%
Usia	<30 tahun	9	13%
	30-40 tahun	21	31%
	41-50 tahun	25	37%
	>50 tahun	13	19%
Jenjang Pendidikan	SMA/SMK Sederajat	43	63%
	Sarjana (S1)	13	19%
	Diploma (D1/D2/D3)	12	18%
Masa Jabatan	<5 tahun	12	18%
	5-10 tahun	19	28%
	>10 tahun	37	54%

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 orang. Kelompok usia yang paling dominan berada pada rentang 41 hingga 50 tahun dengan total 25 responden. Dari segi latar belakang pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK atau yang sederajat, yakni sebanyak 43 orang. Adapun masa kerja terbanyak dimiliki oleh responden dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 37 orang. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian, yang meliputi Kinerja Pengelolaan Dana Desa, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, serta Kompetensi Aparatur Desa.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menyajikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang dikaji, yaitu kompetensi Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, serta Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Pengolahan data statistik deskriptif dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SPSS versi 23. Ringkasan hasil dari analisis ini dapat ditemukan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Budaya Organisasi	68	14	20	16,51	1,625
Sistem Pengendalian Internal	68	15	20	16,60	1,649
Kompetensi Aparatur Desa	68	15	20	16,62	1,584
Kinerja Pengelolaan Dana Desa	68	15	20	17,12	1,697
Valid N	68				

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti untuk variabel Budaya Organisasi (X_1) memiliki rata-rata sebesar 16,51, yang mendekati nilai maksimum yaitu 20,00. Standar deviasi variabel ini tercatat sebesar 1,625, yang lebih rendah dari nilai rata-ratanya, menandakan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju atau sangat setuju terhadap 5 pernyataan yang diajukan. Untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2), nilai rata-rata berada di angka 16,60 dan juga mendekati nilai maksimum 20,00. Nilai standar deviasi sebesar 1,649 yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan tanggapan yang positif, dengan tingkat penyimpangan yang sangat rendah. Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X_3) mencatat rata-rata sebesar 16,62 mengindikasikan kecenderungan responden untuk memberikan jawaban setuju. Standar deviasinya sebesar 1,584 yang juga lebih kecil dari rata-ratanya. Sementara itu, variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 17,12, hampir menyentuh nilai maksimum 20,00. Nilai standar deviasinya yang hanya 1,697 menunjukkan bahwa data pada variabel ini memiliki tingkat kesalahan atau penyimpangan yang rendah.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian, instrumen untuk variabel Budaya Organisasi (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), Kompetensi Perangkat Desa (X_3), dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi seluruh item yang berada di atas angka 0,05.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Hasil
Budaya Organisasi (BO)		
BO1	0,282	valid
BO2	0,444	valid
BO3	0,407	valid
BO4	0,654	valid
BO5	0,581	valid
Sistem Pengendalian Internal (SPI)		
SPI1	0,399	valid
SPI2	0,606	valid
SPI3	0,526	valid
SPI4	0,314	valid
SPI5	0,521	valid
Kompetensi Perangkat Desa (KPD)		
KPD1	0,515	valid
KPD2	0,598	valid
KPD3	0,418	valid
KPD4	0,455	valid
KPD5	0,559	valid
Kinerja Pengelolaan Dana Desa (KPDD)		
KPDD1	0,663	valid
KPDD2	0,712	valid
KPDD3	0,652	valid
KPDD4	0,743	valid
KPDD5	0,701	valid

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, seluruh item pada kuesioner menunjukkan konsistensi yang baik dengan nilai koefisien alpha yang melebihi angka 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tersebut memiliki tingkat keandalan yang cukup untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat dianggap memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian yang terpercaya.

Tabel 4. Tabel Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha 0,6	Deskripsi
Budaya Organisasi	0,714	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,731	Reliabel
Kompetensi Perangkat Desa	0,698	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Dana Desa	0,732	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung nilai koefisien regresi, guna menentukan apakah hipotesis yang telah dirumuskan dapat diterima atau ditolak. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.0 for Windows, dan hasilnya ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tabel Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coeff		Standardized Coeff	
	B	Std.Error	B	t
(Constant)	1,318	1,472		0,
Budaya Organisasi	0,332	0,114	0,318	2,
Sistem Pengendalian Internal	0,275	0,115	0,267	2,
Kompetensi Perangkat Desa	0,346	0,149	0,323	2,

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka persamaan regresi dan arti dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

$$KPDD = 1,318 + 0,332BO + 0,275SPI + 0,346KPD$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstantan (α) sebesar 1,318 yang memiliki arti bahwa variabel Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Perangkat Desa dinyatakan konstan pada angka 0, maka Kinerja Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar konstantanya yaitu sebesar 1,318. Variabel Budaya Organisasi memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,332 yang berarti, variabel Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,275 yang berarti, variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Variabel Kompetensi Perangkat Desa memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,346 yang berarti, variabel Kompetensi Perangkat Desa memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa, secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Apabila nilai signifikansi (P value) yang diperoleh dari hasil uji lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan berkontribusi secara signifikan terhadap Kinerja

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan dapat diterima. Hasil pengujian simultan melalui Uji F ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	124,851	3	41,617	39,050	0,000
	Residual	68,208	64	1,066		
	Total	193,059	67			

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat memengaruhi variasi pada variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R²* sebagai indikator koefisien determinasi, karena nilai tersebut tidak akan meningkat secara signifikan jika variabel yang ditambahkan ke dalam model tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,804	0,647	0,630	1,032

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* adalah 0,630 atau 63 persen, ini artinya variasi kinerja pegelolaan dana desa dipengaruhi oleh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa. Sisanya sebesar 37 persen dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Hipotesis)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig. Uji t
Budaya Organisasi (X_1)	2,911	0,005
Sistem Pengendalian Internal (X_2)	2,390	0,020
Kompetensi Perangkat Desa (X_3)	2,326	0,023

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa Budaya Organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 dengan nilai t hitung sebesar 2,911. Nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,005 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Budaya Organisasi pada pemerintahan desa, maka kinerja pengelolaan dana desa akan cenderung semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa Budaya Organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 dengan nilai t hitung sebesar 2,390. Nilai signifikansi 0,020 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,020 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal pada pemerintahan desa, maka kinerja pengelolaan dana desa akan cenderung semakin baik.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 8 menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 dengan nilai t hitung sebesar 2,326. Nilai signifikansi 0,023 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,023 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi perangkat desa di pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan dana desa akan cenderung semakin efektif.

Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Nilai-nilai yang tertanam dalam budaya kerja seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan transparansi membentuk perilaku kerja yang konsisten. Ketika budaya organisasi dijalankan dengan baik, perangkat desa akan lebih termotivasi untuk bekerja secara profesional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Budaya yang sehat juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan terbuka terhadap pengawasan. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, pengelolaan dana desa menjadi lebih tertib dan akuntabel. Oleh karena itu, pembentukan budaya organisasi yang positif harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan tata kelola desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kinerja pengelolaan dana desa. Budaya kerja yang terstruktur dapat meningkatkan ketaatan perangkat desa terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Sikap kerja yang dibentuk oleh budaya organisasi, seperti kejujuran dan kepedulian terhadap tanggung jawab, memperkuat komitmen terhadap transparansi keuangan. Dalam praktiknya, budaya organisasi memengaruhi cara individu mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas secara kolektif. Dengan begitu, kinerja pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh sistem administratif, tetapi juga oleh nilai-nilai yang dijunjung dalam organisasi. Penerapan budaya kerja yang baik akan mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Maka, semakin kuat budaya organisasi, semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam perspektif *Agency Theory*, budaya organisasi yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian informal yang mampu menekan *agency cost*, terutama *moral hazard* yang muncul dari perilaku oportunistik aparatur desa sebagai *agent*. Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan tanggung jawab mendorong *agent* untuk bertindak selaras dengan kepentingan principal (masyarakat), sehingga asimetri informasi dapat ditekan.

Temuan ini juga menguatkan asumsi teori agensi bahwa ketika nilai organisasi tertanam dengan baik, aparatur cenderung patuh pada aturan dan meminimalkan kecenderungan menyalahgunakan kewenangan. Budaya organisasi bukan sekadar mendorong profesionalitas dan efisiensi, tetapi juga menginternalisasi norma yang mengurangi potensi konflik kepentingan dalam hubungan *principal* dan *agent*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ariani & Gayatri (2021) dimana ketika budaya organisasi yang tercipta dalam suatu organisasi semakin membaik, maka dikatakan dapat menaikkan kinerja manajerial penyelenggara pemerintah. Selain itu, sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratamayasa et al., 2024) dimana memiliki budaya organisasi yang kuat akan memungkinkan pemerintah desa menangani dana secara lebih efektif dan efisien serta memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik. Namun, studi ini memberikan konteks yang lebih baru lagi karena dilakukan di desa yang menghadapi tantangan pengawasan dana yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memperkuat bahwa budaya organisasi yang baik justru semakin vital pada unit pemerintahan yang memiliki potensi penyimpangan tinggi.

Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Adanya mekanisme pengendalian seperti pemisahan tugas, pengawasan berjenjang, dan dokumentasi yang tertib membantu mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Ketika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, perangkat desa lebih terarah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, sistem pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan kejelasan alur kerja dalam penggunaan dana desa. Keberadaan sistem ini menjadi fondasi dalam menjaga transparansi dan integritas pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan dana desa. Sistem ini memberikan arah dan struktur kerja yang jelas bagi perangkat desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Dengan adanya kontrol internal yang baik, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai sasaran. Ini juga memungkinkan terciptanya budaya kerja yang lebih akuntabel, di mana setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya. Penerapan sistem pengendalian internal yang konsisten mampu mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Maka dari itu, perhatian terhadap penguatan sistem pengendalian internal harus menjadi prioritas dalam pembangunan tata kelola desa. Dengan cara ini, desa dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka *Agency Theory*, sistem pengendalian internal berperan sebagai *monitoring mechanism* yang dirancang untuk mengurangi *information asymmetry* antara *principal* dan *agent*. Ketika sistem pengendalian berjalan efektif, melalui pemisahan tugas, validasi dokumen, dan audit berkala, kemungkinan aparatur untuk melakukan *moral hazard* semakin kecil.

Temuan ini memperkuat asumsi dasar teori agensi bahwa semakin kuat mekanisme *monitoring*, maka semakin rendah *agency cost* yang muncul dari penyimpangan, manipulasi informasi, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan. Dengan demikian, pengendalian internal berfungsi tidak hanya untuk memastikan prosedur berjalan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga hubungan *principal agent* tetap selaras.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019), Santi Putri Laksmi & Sujana (2019), Puspita & Ratnadi (2023) serta Shafira & Utami (2021). Jika aparat desa menerapkan sistem pengendalian internal secara rutin, hal ini akan memberikan kepercayaan masyarakat bahwa tujuan kantor desa akan tercapai dan keuangan desa akan dikelola secara bertanggung jawab. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dalam konteks Candiroti yang memiliki riwayat penyalahgunaan dana desa. Maka, pengaruh pengendalian internal menjadi lebih relevan karena mampu mengatasi kelemahan pengawasan yang ditemukan sebelumnya.

Kompetensi Perangkat Desa dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Kompetensi perangkat desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional akan lebih mampu menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan secara akurat dan bertanggung jawab. Tingkat pemahaman terhadap regulasi, sistem administrasi keuangan, serta kemampuan teknis lainnya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program desa. Ketika kompetensi aparatur memadai, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas individu sangat berkontribusi pada kinerja

institusional dalam tata kelola keuangan desa. Aparatur yang kompeten juga cenderung lebih responsif terhadap perubahan kebijakan serta lebih terbuka terhadap sistem pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa menjadi syarat utama untuk mencapai pengelolaan dana desa yang baik.

Aparatur desa yang memahami tanggung jawabnya tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Dalam praktiknya, kompetensi ini mencakup kemampuan dalam penyusunan anggaran, pengelolaan laporan keuangan, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan rencana kerja. Dengan keterampilan tersebut, potensi penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan dana dapat diminimalkan. Selain itu, kompetensi juga mendorong aparatur untuk lebih adaptif terhadap sistem teknologi dan pelatihan yang menunjang pengelolaan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur merupakan langkah krusial dalam memperkuat tata kelola dana desa.

Secara teoretis, kompetensi yang tinggi mengurangi risiko *information asymmetry* karena agent mampu memahami regulasi, menyusun laporan keuangan yang akurat, dan melaksanakan prosedur sesuai ketentuan. Aparatur yang kompeten memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya kepada principal, sehingga *agency cost* terkait misreporting atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi.

Temuan ini relevan dengan perspektif teori agensi bahwa ketidakmampuan *agent* justru dapat memperbesar ruang untuk moral hazard karena *principal* tidak dapat menilai apakah kesalahan muncul akibat kelalaian atau kesengajaan. Dengan meningkatnya kompetensi, kualitas informasi meningkat dan potensi perilaku oportunistik dapat ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistyowati & Prasetyo (2025) dimana Perangkat desa yang memiliki keahlian memadai juga berpeluang besar mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menyusun skala prioritas anggaran dengan tepat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Hasil penelitian dari Jati et al., (2023) juga menunjukkan hasil yang sejalan dimana mereka menyimpulkan bahwa apabila semakin tinggi kompetensi aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas serta kinerja pengelolaan dana desa yang baik, maka aparatur desa dipercaya dapat mempertanggungjawaban kinerja dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Budaya organisasi yang kuat membentuk perilaku kerja yang akuntabel dan disiplin, sistem pengendalian internal yang efektif mampu menekan potensi penyimpangan, serta kompetensi aparatur yang tinggi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana desa. Ketiga faktor tersebut secara kolektif memperkuat tata kelola dana desa, sehingga dapat mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada sinergi antara aspek budaya kerja, mekanisme pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus variabel yang hanya mencakup budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa, sehingga belum mempertimbangkan faktor lain seperti kepemimpinan, motivasi kerja, atau partisipasi masyarakat yang juga berpotensi memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga masih terbatas pada analisis hubungan antarvariabel secara linier dan belum mengkaji kemungkinan adanya interaksi atau efek moderasi di antara variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan yang lebih luas lagi. Pemerintah desa juga disarankan untuk memperkuat komunikasi internal, memperjelas pembagian tugas, serta

membangun budaya kerja yang kolaboratif guna mendukung efektivitas pengelolaan dana secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, J., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Sulistyowati, A., & Mufatichien, H. A. (2025). Transformasi Digital Dalam Pembukuan: Pelatihan Akuntansi Dengan Teknologi Modern. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(2), 282–288.
- Ariani, A., & Gayatri, G. (2021). Good Governance, Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2481. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p06>
- Dinda Natalia, S. A. P., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p06>
- Eka Putra, I. P. A. P., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di LPD se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p20>
- Harahap, W. S. M., & Wirananda, H. A. (2023). The Effect Of Community Participation, Transfotmational Leadership And Internal Control Systems On Accountability Financial Management Of Village Funds In Labu Beach District Village Deli Serdang. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(1), 73–91. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i1.1450>
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Ni Made, I. P., I Dewa Ayu, K., & Ayu Eka, P. I. D. (2024). Accountability of Village Fund Management in the Perspective of Agency Theory. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(10), 6392–6398. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-34>
- Pratamayasa, D. P., Murapi, I., & Ajiani, I. P. F. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 12(1), 18–32. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx>
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p05>
- Radar Semarang. (n.d.). *Tak Hanya di Kendal, Kasus Korupsi Dana Desa juga Terjadi di Muntung Temanggung, Kerugian Capai Rp 295 Juta*. Jawapos.

<https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/724957309/tak-hanya-di-kendal-kasus-korupsi-dana-desa-juga-terjadi-di-muntung-temanggung-kerugian-capai-rp-295-juta>

- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1025–1040. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p18>
- Sulistiyowati, A., Andriani, J., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Iriani, L., Setyaputri, K. E., & Riskanita, D. (2024). Pendampingan Pembuatan AD ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Makmur Mandiri” Sendangtirto, Berbah, Sleman. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 231–239.
- Sulistiyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2025). AKUNTABILITAS DANA DESA: KAJIAN TERHADAP PERAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI APARATUR DESA. *JURNAL AKUNIDA*, 11(1), 16–28.
- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873.
- Sulistiyowati, A., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Riskanita, D., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Sistem Pencatatan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa: The Influence of Financial Manager Competence, Financial Recording System, and Village Community Participation on the Financial Performance of Village-Owned Enterprises. *Al Dzahab*, 6(2), 239–249.